



**LAPORAN KINERJA
(LAKIN) TAHUN 2024
KPP MADYA PALEMBANG**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA PALEMBANG
JL. TASIK, KAMBANG IWAK PALEMBANG
TELEPON 0711-357077 FAX 0711-355025**

KATA PENGANTAR

Pemerintah semakin bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia maju. Berbagai upaya pun dilaksanakan seperti peningkatan pembangunan yang secara masif dan terus menerus dilakukan di berbagai daerah. Sumber dana pembangunan itu sendiri diperoleh dari kekayaan alam dan rakyat. Rakyat sebagai salah satu pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya turut mempunyai andil dalam menyampaikan aspirasinya. Mencermati hal itu, pemerintah berusaha menyusun sistem kerja yang transparan, jelas, dan akuntabel dengan harapan penyelenggaraan negara dapat berhasil dengan baik dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga, dikeluarkanlah Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 yang memuat Azas Penyelenggara Negara menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai salah satu instansi pemerintah, pelaksanaan kerja di KPP Madya Palembang haruslah menjunjung akuntabilitas. Perencanaan, implementasi dan evaluasi atas hasil akhir suatu pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran di KPP Madya Palembang. Kami berharap semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.

Palembang, Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Ega Fitrinawati



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dilakukan KPP Madya Palembang dalam merealisasikan penerimaan yang diamanahkan melalui beberapa program dan rincian kegiatan. Selain itu juga untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas capaian tujuan/sasaran instansi dan penggunaan anggaran di KPP Madya Palembang.

KPP Madya Palembang berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2020. Sejalan dengan proses menuju Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM), KPP Madya Palembang terus berkomitmen dalam menjaga integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas KPP Madya Palembang yaitu sebagai berikut :

1. Internal
 - a. Jumlah dan Kualitas Pegawai;
 - b. Kedisiplinan Pegawai;
 - c. Sistem Informasi DJP;
2. Eksternal
 - a. Kondisi Geografis;
 - b. Potensi Ekonomi;
 - c. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Perpajakan;
 - d. Koordinasi dengan instansi terkait (vertikal dan horisontal);
 - e. Peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan pajak.

Dari sisi fungsi *budgetair* pada akhir tahun pajak 2024 KPP Madya Palembang berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp 6.200.614.538.041,- atau sebesar 100% dari target Rp. 6.200.511.947.00,- yang telah ditetapkan. Selain itu Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Palembang Tahun 2014 adalah 109,38%. Hal ini menunjukkan sebuah keberhasilan dari sinergi yang baik secara organisasi yang telah dilakukan oleh semua unsur di KPP Madya Palembang mengingat tantangan dan tingginya target penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Madya Palembang.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Palembang disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Dengan penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus dapat digunakan sebagai instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan hendaknya dapat dilihat dari beberapa sisi, baik dari pencapaian target penerimaan, tingkat pertumbuhan, tingkat kepatuhan wajib pajak, maupun hal-hal positif lainnya yang mengindikasikan perbaikan kinerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

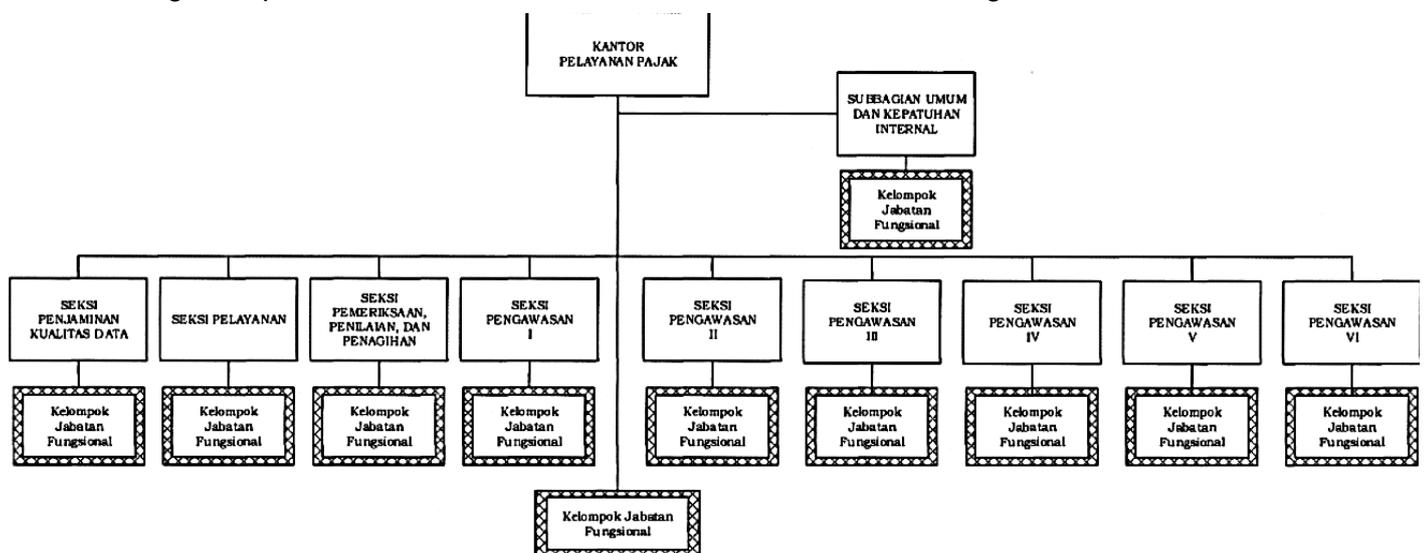
Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi;
11. Pelaksanaan administrasi KPP Madya.

KPP Madya Palembang memiliki wewenang berupa pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap wajib pajak di bidang PPh, PPN, PPh BM, dan PTLL dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan wewenang tersebut KPP Madya Palembang memiliki peran yang sangat strategis untuk berkontribusi dalam mencapai rencana penerimaan negara. Tercapainya target yang telah ditetapkan akan turut mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan tidak tercapainya pencapaian target juga akan dapat berpengaruh terhadap tercapainya penerimaan Negara sesuai target APBN/APBN-P.

Struktur Organisasi KPP Madya Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagai berikut.



Berikut data mengenai Sumber Daya Manusia pada KPP Madya Palembang per 31 Desember 2024.

Berdasarkan Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	10
3.	Fungsional Pemeriksa Pajak	30
4.	Fungsional Penyuluh	5
5.	Fungsional Penilai	1
6.	Account Representative	38
7.	Pelaksana Lainnya	26
Total		111

Berdasarkan Unit Eselon IV

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1
2.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	11
3.	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4
4.	Seksi Pelayanan	13
5.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	6
6.	Seksi Pengawasan I	9
7.	Seksi Pengawasan II	7
8.	Seksi Pengawasan III	8
9.	Seksi Pengawasan IV	8
10.	Seksi Pengawasan V	7
11.	Seksi Pengawasan VI	7
12.	Fungsional Pemeriksa Pajak	30
Total		111

Berdasarkan Gender

No.	Gender	Jumlah	Persentase
1.	Pria	97	87,4%
2.	Wanita	14	12,6%
Total		111	100%

Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	32
2.	Strata 1/Diploma IV	49
3.	Diploma III	17
4.	Diploma I	11
5.	SMA/Sederajat	2
Total		111

Berdasarkan Pegawai Berkebutuhan Khusus

No.	Kebutuhan Khusus	Jumlah
1.	Tanpa Kebutuhan Khusus	111
2.	Berkebutuhan Khusus	-
Total		111

KPP Madya Palembang memiliki upaya peningkatan kesadaran terhadap persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga mengintegrasikan pegawai agar dapat berpartisipasi dalam pendidikan ataupun kegiatan lainnya yang menunjang organisasi serta menginstruksikan pegawai untuk menghargai dan memperjuangkan kesetaraan disabilitas dan membebaskan mereka dari segala bentuk diskriminasi struktural dan kultural apabila ada pegawai yang memiliki kebutuhan khusus.

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Tahun 2024 KPP Madya Palembang terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi; struktur organisasi KPP Madya Palembang; Program serta sistematika pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan mengenai Rencana Strategis (Renstra), Program Unggulan, perencanaan anggaran, serta refinement Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lainnya

Subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan KPP Madya Palembang.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPP Madya Palembang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

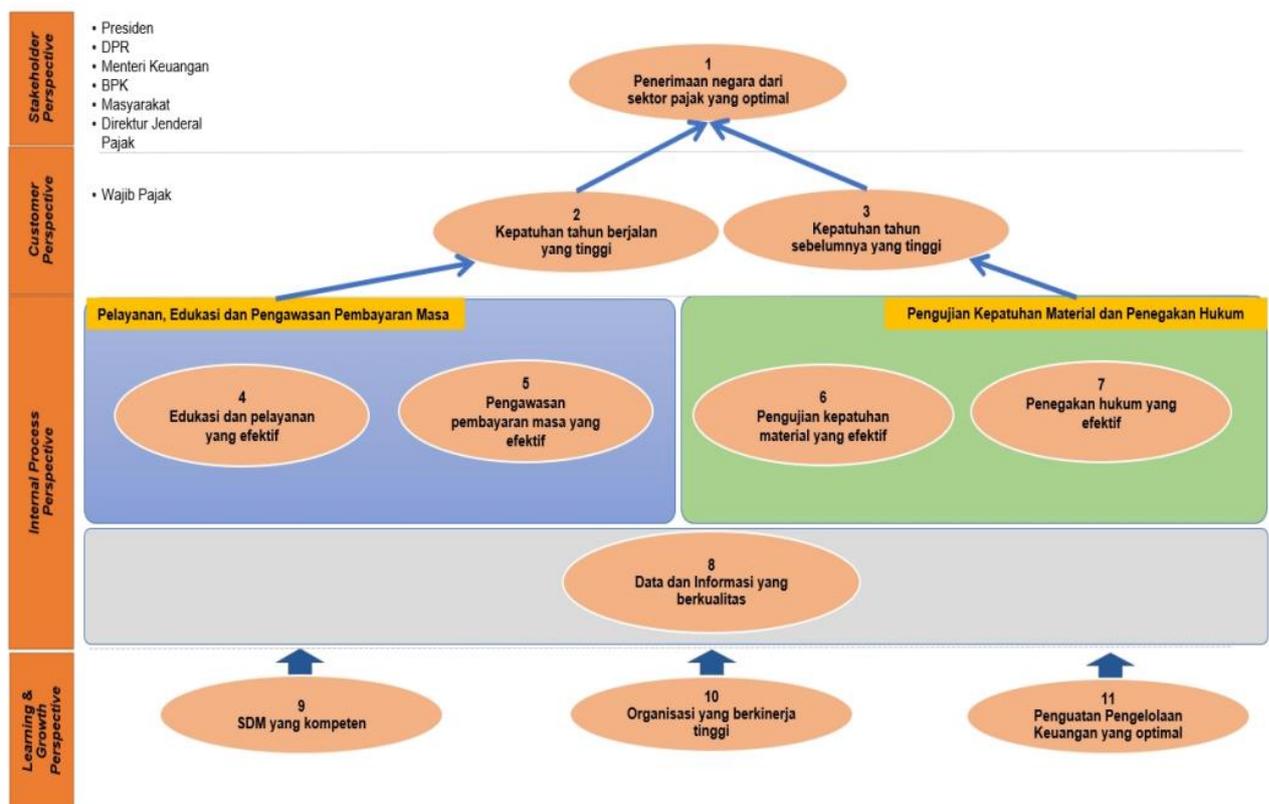
A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tusi DJP antara lain Rasio Perpajakan terhadap PDB dan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax). Penjelasan terkait RPJMN terdapat dalam buku RENSTRA yang telah dilampirkan pada ND terkait Penyusunan LAKIN 2024.

Sebagai langkah awal dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan kinerja harus dibuat agar instansi pemerintah mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik serta dapat menyajikan performa kinerja yang handal, tepat, dan akurat. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Perencanaan Kinerja KPP Madya Palembang tahun 2024 disusun dalam sebuah Kontrak Kinerja KPP Madya Palembang tahun 2024. Kontrak Kinerja ini berisikan Rencana Kinerja KPP Madya Palembang untuk tahun 2024 yang diuraikan dalam Rencana Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi KPP Madya Palembang tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Selain itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2024. Hasil Refinement Peta Strategi dan IKU tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One (Direktur Jenderal Pajak) tahun 2024 dan ditandatangani antara Direktur Jenderal Pajak bersama Menteri Keuangan. Pada PK Kemenkeu-One DJP tahun 2023, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja KPP Madya Palembang dituangkan dan ditandatangani antara Kepala KPP Madya Palembang dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran Kinerja Kepala KPP Madya Palembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100%
		2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%
		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-N	Persentase penyelesaian laporan pengamatan	100%
9.	SDM yang kompeten	9a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	87%
10.	Organisasi yang berkinerja tinggi	10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90%
11.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja berikut ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan/program yang ditetapkan indikator kinerja dan capaian indikator kerjanya. Penyusunan LAKIN KPP Madya Palembang Tahun 2024 pada PK Kepala KPP Madya Palembang Nomor PK-8/WPJ.03/2024 dengan data dan analisis data sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Stakeholder Perspective
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	24,00%	53,00%	53,00%	79,00%	79,00%	100%	100%
Realisasi	15,05%	37,53%	37,53%	56,23%	56,23%	100%	100%
Capaian	62,71%	70,81%	70,81%	71,18%	71,18%	100%	100%

- Deskripsi Sasaran Strategis**
 Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa ; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh KPP Madya Palembang dengan penuh integritas dan secara akuntabel.
- Definisi IKU**
 Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
 Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP Madya Palembang merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Angka Mutlak	6.200.511.947.000	6.200.614.538.041
Persentase	100%	100%

Pada tahun 2024, IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak memenuhi target dengan realisasi sebesar 100% dan realisasi angka mutlak sebesar 6.200.614.538.041.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	94,27	116,94%	113,56%	101,83%	100%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, Pertumbuhan 4 Sektor Dominan Penopang Penerimaan di KPP Madya Palembang mengalami pertumbuhan negatif, sehingga realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Melakukan pengawasan kegiatan usaha Wajib Pajak
 - Melakukan penggalian potensi secara maksimal
 - Mengusulkan Wajib Pajak yang berpotensi untuk DPP kolaboratif
 - Melakukan penerbitan SP2DK atas DPP yang telah ditetapkan
 - Melakukan tindaklanjut SP2DK
 - Melakukan usul pemsus
 - Melakukan kegiatan penagihan aktif secara maksimal
 - Menerbitkan STP
 - Melakukan Pengawasan Pembayaran Rutin

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	-	100%	100%

Sumber : Aplikasi Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, serta Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor.

4. Perbandingan antara realisasi Capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

5. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis penerimaan yang mengalami Shortfall dan Surplus untuk dilakukan kegiatan pengawasan - Optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa melalui Dashboard Manajemen Pengawasan. - Melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap 100 Wajib Pajak Besar penentu penerimaan secara intensif. - Melakukan monitoring Aplikasi Tools Sharepoint Penerimaan untuk updating Penerimaan PPM. - Mengoptimalkan Rapat Komite Kepatuhan secara rutin. - Melakukan evaluasi penerimaan mingguan berdasarkan data infografis penerimaan. - Melakukan imbauan terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan penyeteroran PPh Pasal 25 atau diterbitkan STP. 	2025

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1b-CP IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	96,95%	96,24%	96,24%	95,14%	95,14%	97,39%	97,39%
Capaian	96,95%	96,24%	96,24%	95,14%	95,14%	97,39%	97,39%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

- Formula IKU

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Realisasi IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Capaian	100%	97,39%

Pada tahun 2024, IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak memenuhi target dengan realisasi sebesar 97,39%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	54,37%	111,07%	96,48%	108,84%	97,39%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU
Pada Tahun 2024, Pertumbuhan Bruto Penerimaan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,31%, sehingga realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Melakukan analisis trend penerimaan dan manajemen restitusi dalam membuat proyeksi penerimaan.
 - Memantau billing Wajib Pajak yang belum terbayar di Apportal.
 - Melakukan konfirmasi pembayaran kepada wajib Pajak secara langsung
 - Benchmark Wajib Pajak dengan usaha sejenis yang mengalami surplus
 - Penggunaan Aplikasi DRM dalam membuat Proyeksi Penerimaan.

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis penerimaan yang mengalami Shortfall dan Surplus untuk dilakukan kegiatan pengawasan - Melakukan identifikasi pembayaran pajak tahun berjalan berdasarkan analisa pembayaran tahun sebelumnya - Melakukan identifikasi dan analisis pembayaran per jenis pajak, pertumbuhan dan sektoral dominan (shortfall dan surplus) - Pengawasan Wajib Pajak 100 Besar secara intensif - Meminta/memanfaatkan data PDRB dan atau data lainnya dari Kanwil atau dari pihak eksternal lain 	2025

Customer perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	24,00%	53,00%	53,00%	79,00%	79,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,21%	38,23%	38,23%	57,73%	57,30%	99,96%	99,96%
Capaian	63,38%	72,13%	72,13%	73,08%	72,53%	99,96%	99,96%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Angka Mutlak	5.232.812.567.000	5.230.736.695.749
Persentase	100%	99,96%

Pada tahun 2024, IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak memenuhi target dengan realisasi sebesar 99,96% dan realisasi angka mutlak sebesar 5.230.736.695.749.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	115,77%	113,14%	110,53%	99,96%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, menurunnya realisasi IKU tersebut disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

 1. Pertumbuhan Sektor Dominan Penopang Penerimaan mengalami penurunan
 2. Terdapat WP yang tidak menyetor pajak di tahun berjalan atau WP kesulitan keuangan/likuiditas
 3. Peningkatan Restitusi yang signifikan dari tahun lalu

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Melakukan analisis penerimaan yang mengalami Shortfall dan Surplus untuk dilakukan kegiatan pengawasan
 - Memanggil 20 Besar Wajib Pajak dan Wajib Pajak Grup untuk bertemu dengan Kepala Kantor dan meminta konfirmasi pembayaran s.d. Desember 2024
 - Melakukan monitoring Aplikasi Tools Sharepoint Penerimaan untuk updating Penerimaan PPM Meningkatkan Peran Aktif Rapat Komite Kepatuhan
 - Melakukan Dinamisasi PPh pasal 25 yang terdapat pada dafnom dan yang tidak terdapat pada dafnom yang mengalami pertumbuhan surplus

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi pembayaran pajak tahun berjalan berdasarkan analisa pembayaran tahun sebelumnya - Melakukan identifikasi dan analisis pembayaran per jenis pajak, pertumbuhan dan sektoral dominan (shortfall dan surplus) - Pengawasan Wajib Pajak 100 Besar secara intensif - Meminta/memanfaatkan data PDRB dan atau data lainnya dari Kanwil atau dari pihak eksternal lain - Mengusulkan permintaan bantuan penilaian dari Kanwil dan atau unit kerja lain - Menerbitkan SP2DK terkait dengan pembayaran tahun berjalan - Menerbitkan STP terkait dengan pembayaran tahun berjalan 	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2b-CP IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	51,15%	115,83%	115,83%	121,54%	121,54%	122,07%	122,07%
Capaian	85,25%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Angka Mutlak	1.701	1.760
Persentase	100%	122,07%

Pada tahun 2024, IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 122,07% dan indeks 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,21%	100%	100%	100,45%	122,07%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024 terdapat 3 Wajib Pajak yang termasuk ke dalam WP Wajib SPT yang belum melaporkan SPT Tahunan 2023. Namun jumlah wajib pajak yang telah melapor melebihi target yang telah ditentukan.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

- Melakukan Konseling dengan WP
- Menerbitkan himbauan, teguran, STP terhadap WP yang tidak menyampaikan pelaporan SPT Tahunan
- Memberikan edukasi dan penyuluhan terkait pelaporan SPT Tahunan
- Melakukan visit untuk wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan
- Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti WP wajib SPT tahun 2024, dan mengusulkan Wajib Pajak NE, Wajib Pajak dalam upaya hukum, Wajib Pajak yang tidak diketahui keberadaannya, dan Wajib Pajak yang tidak aktif untuk dikeluarkan dari daftar Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan Tahun 2024 - Menerbitkan imbauan untuk pelaporan SPT Tahunan lebih awal - Membuka layanan perpajakan di luar kantor - Mengimbau dan melakukan sosialisasi kepada WP Pemberi Kerja untuk pelaporan SPT Karyawan - Melakukan monitoring pelaporan SPT Tahunan 	2025

Customer perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,77%	44,54%	44,54%	47,00%	47,00%	100,23%	100,23%
Capaian	75,08%	89,08%	89,08%	62,67%	62,67%	100,23%	100,23%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Angka Mutlak	967.699.380.000	969.877.842.292
Persentase	100%	100,23%

Pada tahun 2024, IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100,23% dan realisasi angka mutlak sebesar 969.877.842.292.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	128,09%	115,85%	63,56%	100,23%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU
 Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan, namun masih terdapat kendala dalam mencapai IKU tersebut yaitu:
 1. Wajib Pajak yang masuk ke dalam DPP berulang kali masuk dalam kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan
 2. Terdapat Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas
 3. Terdapat Wajib Pajak yang setuju atas hasil pemeriksaan namun tidak melakukan pembayaran atas SKP yang terbit

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Melakukan Penyusunan DPP yang berkualitas, fokus terhadap Wajib Pajak yang mempunyai potensi besar, sektor sawit, Batubara Hulu Hilir dan Perdagangan
 - Melakukan Penyusunan Benchmarking
 - Melakukan Fokus Audit untuk sektor tertentu

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan percepatan penerbitan LHP2DK Triwulan I 2025 - Mengusulkan DPP Mandatori - Penelitian SPOP PBB P5L Wajib Pajak - Melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak untuk mengangsur dengan membuat timeline - Melakukan pengawasan pembayaran sesuai dengan komitmen Wajib Pajak - Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai komitmen akan diusulkan pemeriksaan - Melakukan pendekatan secara persuasif kepada WP untuk melakukan pembayaran atas SKP yang diterbitkan - Melakukan koordinasi dengan JSPN dengan melakukan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak - Pengawasan terhadap 100 WP Penunggak Pajak terbesar dan 100 WP DSPC - Pengawasan penerbitan SP2 pemeriksaan khusus yang berpotensi dilakukan pembayaran - Pengawasan penyelesaian pemeriksaan terutama terhadap Wajib Pajak yang berpotensi melakukan pembayaran 	2025

<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengujian secara komprehensif sehingga hasil pemeriksaan mendekati nilai potensi usul pemeriksaan untuk meningkatkan Success Rate - Inventarisasi wajib pajak untuk dilakukan profiling dan penanggung Wajib Pajak Prioritas tindakan penagihan 	
--	--

Internal Process Perspective
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	31,42%	86,44%	86,44%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%						

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	74	88,80

Pada tahun 2024, IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 88,80 dan indeks capaian 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	77,5%	80,40%	84%	88,8%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan, namun masih terdapat kendala dalam mencapai IKU tersebut seperti Rendahnya respon Wajib Pajak calon peserta kegiatan serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik melaporkan dan/atau membayar masih rendah.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan berbagai metode dan pendekatan sehingga edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dapat terlaksana dengan baik, menyeluruh dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan penyuluhan kepada seluruh Wajib Pajak - Sinergi dengan Seksi Pengawasan dalam penentuan DSPT	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

4b-N IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,23%	6,36%	12,59%	6,39%	18,98%	109,19%	109,19%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,19%	109,19%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100%	109,19%

Pada tahun 2024, IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 109,19%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	83,75%	99,46%	82,32%	109,19%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU
Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi hasil survei yang sudah baik.
- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Menghimbau Wajib Pajak yang telah mendapatkan edukasi dan pelayanan baik di TPT maupun Helpdesk untuk mengisi Survei.
 - Memasang/menempatkan QR dan link survei di meja pelayanan (baik TPT maupun Helpdesk) untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memberikan suara dan penilaian mereka dalam survei.
 - Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan s.d. Triwulan IV Tahun selanjutnya.

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi saluran pengaduan/survey kepuasan layanan di KPP melalui TPT, Helpdesk dan media sosial. - Menghimbau Wajib Pajak yang telah mendapatkan edukasi dan pelayanan baik di TPT maupun Helpdesk untuk mengisi Survei. - Tindak Lanjut atas hasil survey kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Triwulan IV. 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

5a-CP IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	110,84%	110,84%	110,98%	110,98%	119,92%	119,92%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- Formula IKU

Realisasi = (Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti×40%)+
(Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25×30%)+
(Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan×30%)

- Realisasi IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	90%	119,92%

Pada tahun 2024, IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 119,92% dengan indeks capaian 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	100%	106,06%	108,21%	119,92%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU
 Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi hasil survei yang sudah baik. Namun masih terdapat permasalahan yaitu Daftar Nominatif STP yang turun bersifat dinamis, kuantitas yang selalu bertambah dan waktu dalam penurunan Dafnom yang tidak dapat diketahui.
- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Menerbitkan STP, Melakukan pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, dan melakukan tindak lanjut data matching
 - Menindaklanjuti seluruh data pemicu dan data penguji tahun berjalan menjadi LHPt dan/atau SP2DK segera setelah data diturunkan pada aplikasi APPROWEB

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis penerimaan yang mengalami Shortfall dan Surplus untuk dilakukan kegiatan pengawasan - Melakukan identifikasi pembayaran pajak tahun berjalan berdasarkan analisa pembayaran tahun sebelumnya - Melakukan identifikasi dan analisis pembayaran per jenis pajak, pertumbuhan dan sektoral dominan (shortfall dan surplus) - Pengawasan Wajib Pajak 100 Besar secara intensif - Menerbitkan STP untuk seluruh daftar nominative yang ada di Approweb dan versi PKP - Melakukan pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 - Melakukan tindak lanjut data matching atas masa dan tahun pajak yang jatuh tempo di tahun berjalan 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	40%	40%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	40%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
---	---	--

- Realisasi IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100%	120%

Pada tahun 2024, IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik, masih terdapat SP2DK yang belum mendapatkan respon dari Wajib Pajak.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

- Menerbitkan dan mengirim SP2DK sesuai usulan DPP yang telah ditetapkan
- Membuat LHPT2DK atas SP2DK yang telah dikeluarkan

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penelitian komprehensif atas Wajib Pajak sesuai dengan peta kepatuhan - Penyelesaian atas DPP Semester I tahun 2025 - Melakukan Konseling terhadap Wajib Pajak yang belum merespon - Melakukan Visit ke Lokasi Wajib Pajak 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

6b-N IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	116,79%	116,79%	117,16%	117,16%	119,36%	119,36%
Capaian	120,00%	116,79%	116,79%	117,16%	117,16%	119,36%	119,36%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen yaitu Pemanfaatan Data STP dan Pemanfaatan Data Matching

- Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching:

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP Madya Palembang)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100%	119,36%

Pada tahun 2024, IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 119,36%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120%	119,36%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

- Menindaklanjuti dafnom STP selain tahun berjalan di Approweb.
- Mengusulkan DPP untuk wajib pajak yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan
- Menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan LHPT dan SP2DK sebagai tindak lanjut atas penelitian komprehensif untuk menindaklanjuti semua data termasuk data pemicu selain tahun berjalan.
- Melakukan monitoring atas dafnom STP selain tahun berjalan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring atas dafnom STP dan data pemicu selain tahun berjalan yang belum ditindaklanjuti pada aplikasi Mandor - Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan untuk dimasukkan dalam DPP agar dapat ditindaklanjuti dengan SP2DK 	2025

- Menerbitkan STP dan menindaklanjuti semua dafnom STP selain tahun berjalan di aplikasi Approweb	
---	--

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

6c-N IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	105,34%	105,34%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	105,34%	105,34%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
+ 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100%	120%

Pada tahun 2024, IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik. Namun masih terdapat permasalahan yaitu Komponen 2 pada IKU Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak belum optimal pada triwulan sebelumnya namun telah sangat optimal pada akhir tahun.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

- Menindaklanjuti rencana kerja komite kepatuhan
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada Dashboard Rapor Kinerja
- Membuat Nota Dinas permintaan usulan bahan baku pemeriksaan kepada Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksaan Pajak
- Mengadministrasikan usulan pemeriksaan
- Mengadakan rapat pembahasan untuk menetapkan DSPP yang akan diusulkan baik melalui mekanisme RBP maupun kolaboratif
- Melakukan pengiriman Nota Dinas atas Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Rencana Kerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk tahun selanjutnya - Melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada Dashboard Rapor Kinerja - Membuat Nota Dinas permintaan usulan bahan baku pemeriksaan kepada Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak; - Mengadministrasikan usulan pemeriksaan; - Mengadakan rapat pembahasan untuk menetapkan DSPP yang akan diusulkan baik melalui mekanisme RBP maupun Kolaboratif. - Melakukan Pengiriman Nota Dinas atas Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

7a-CP IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	109,08%	109,15%	109,15%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	109,08%	109,15%	109,15%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$$= (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100%	120%

Pada tahun 2024, IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik meskipun masih terdapat wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar yang rendah.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

- Meningkatkan mutu pelaksanaan pemeriksaan dengan mendiskusikan permasalahan pemeriksaan secara intensif

- Menerbitkan SKP Pemeriksaan dengan mempertimbangkan potensi DSPP
- Mempercepat proses pemeriksaan dengan membuat monitoring penyelesaian pemeriksaan setiap bulan

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan waktu penyelesaian pemeriksaan secara simultan. - Meningkatkan mutu pemeriksaan melalui FGD di bidang pemeriksaan. - Melaksanakan rapat komite kepatuhan sebelum melakukan usulan DSPP. - Melakukan manajemen dalam penerbitan SP2 sehingga penyelesaian LHP tepat waktu dapat lebih dioptimalkan. 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

7b-CP IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	21,83%	49,90%	49,90%	90,87%	90,87%	114,68%	114,68%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

$$= (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- **Realisasi IKU**

Tingkat efektivitas penagihan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	75%	114,68%

Pada tahun 2024, IKU Tingkat efektivitas penagihan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 114,68% dan indeks capaian 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat efektivitas penagihan	100%	110,25%	118,46%	104,15%	114,68%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Analisis terkait capaian IKU**

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik dengan tindakan melakukan optimalisasi tindakan penagihan aktif seperti Teguran, Paksa, dan Penyitaan

- **Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja**

Menerbitkan Surat Teguran, Menerbitkan Surat Paksa, Melakukan Sita, Blokir, dan Pencegahan

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi secara teliti Wajib Pajak yang akan dilakukan pencegahan - Menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

7c-N IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat di tindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100%	200%

Pada tahun 2024, IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 200% dan indeks capaian 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

Melakukan pembahasan WP yang dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pembahasan terkait WP yang dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan	2025

Internal Process Perspective

SS Data dan Informasi yang berkualitas

8a-CP IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	25,18%	76,68%	76,68%	96,25%	96,25%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
 2. Produksi Alat Keterangan
- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

2. Produksi Alat Keterangan

$$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$$

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

$$= \frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100%	120%

Pada tahun 2024, IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

- Melaksanakan Pengamatan terhadap Wajib Pajak yang telah ditentukan
- Melakukan pencarian dan penelitian produksi Alat Keterangan

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melaksanakan Pengamatan terhadap Wajib Pajak yang telah ditentukan - Melakukan Percepatan Produksi Alat Keterangan	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,21%	117,21%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,21%	117,21%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$

Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$

- Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100%	117,21%

Pada tahun 2024, IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 117,21%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,21%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU
Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik.
- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Memberikan himbauan kepada pegawai untuk memenuhi standar jam pelatihan pegawai
 - Memberikan pembekalan kepada pegawai yang akan melaksanakan ujian Kenaikan grading

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Tim untuk pencarian dan pengumpulan materi - Optimalisasi kelompok belajar - Optimalisasi coaching - melaksanakan kegiatan kebintalan SDM setiap Triwulan dengan tema yang berbeda 	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9b-N IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Realisasi	-	-	-	100,00%	100,00%	93,95%	93,95%
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	110,53%	110,53%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

$$= ((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- **Realisasi IKU**

Indeks Penilaian Integritas Unit	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	85	93,95

Pada tahun 2024, IKU Tingkat Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 93,95.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	92,96	96,35	96,15	93,95

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU
Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik.
- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Penandatanganan dan Pendeklarasian Komitmen Integritas Pimpinan kepada seluruh pegawai
 - Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Survei
 - Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Inspeksi Mendadak

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Nota Dinas Imbauan Pengendalian Gratifikasi pada Momen Hari Raya Tahun 2024 ke seluruh pegawai - Melaksanakan Rapat Monev Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM Triwulan I Tahun 2025 - Menyelenggarakan sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku kepada seluruh pegawai - Melaksanakan ICV Team Building Tahun 2025 - Melakukan permintaan dan pengiriman data longlist responden 	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9c-N IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	23,19%	59,33%	59,33%	89,30%	89,38%	100,00%	100,00%
Capaian	100,83%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,11%	111,11%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	90%	100%

Pada tahun 2024, IKU Tingkat Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100% dan indeks capaian 111,11%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	100%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU
Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik.
- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
 - Membuat ND Pelaksanaan DKO
 - Menyusun Laporan NKO
 - Menyusun Penjelasan Progress IKU
 - Membuat nota dinas Penunjukan Person In Charge (PIC) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three Tahun 2024
 - Menyusun matriks Tindak Lanjut
 - Menyusun Risalah Rapat
 - Penyampaian Piagam Manajemen Risiko
 - Membuat Dokumen Manajemen Risiko
 - Melakukan input realisasi rencana aksi pada aplikasi Periskop
 - Melakukan Penyampaian Imbauan Manajemen kinerja berdasarkan nota dinas budaya kinerja tahun 2024

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tahap-tahap Manajemen Kinerja secara tepat waktu - Melaksanakan tahap-tahap pelaporan Dialog Kinerja Organisasi secara tepat waktu - Melaksanakan tahap-tahap pelaporan Mitigasi Risiko secara tepat waktu 	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	104,71%	104,71%	104,71%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	104,71%	104,71%	104,71%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II

Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ($95 < x < 98$)
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA $<$ 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^*$ ($91 < x < 95$)
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ($80 < x < 91$)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA $<$ 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

- Realisasi IKU

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase	100	120

Pada tahun 2024, IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	120

Sumber : Aplikasi Mandor

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024, realisasi IKU telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi yang sudah baik.

- Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

Membuat time schedule pengelolaan penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024

3. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Monitoring realisasi penggunaan anggaran yang terukur	2025
- Menginput Capaian Output pada aplikasi Sakti	

B. Realisasi Anggaran 2024

Anggaran yang direncanakan untuk membiayai program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kinerja KPP Madya Palembang Tahun 2024 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

IKU PKPA Triwulan IV 2024				
	Indikator IKPA	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	100	10	10
2	Halaman III DIPA	100	15	15
3	Penyerapan Anggaran	100	20	20
4	Belanja Kontraktual	100	10	10
5	Penyelesaian Tagihan	100	10	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
7	Dispensasi SPM	100	0	0
8	Konfirmasi Capaian Output	100	25	25
A	Nilai IKPA (50%)			100
B	Nilai SMART (50%)			100
Nilai IKPA PKPA Triwulan IV 2024				100

Berikut penjelasan mengenai Nilai Indeks

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

Nilai IKPA PKPA Tahun 2024 adalah 100, sehingga nilai Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 120.

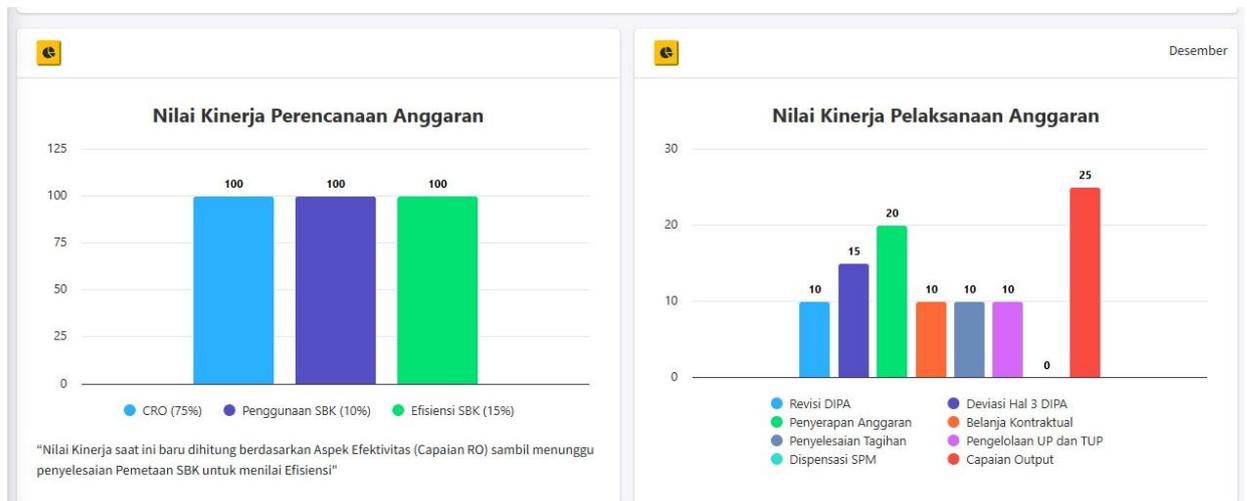
Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas beberapa komponen, yaitu:

- Penyerapan anggaran adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang mengacu pada Sistem Akuntansi Umum.
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai

(pencapaian *output*-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian *output* tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak.

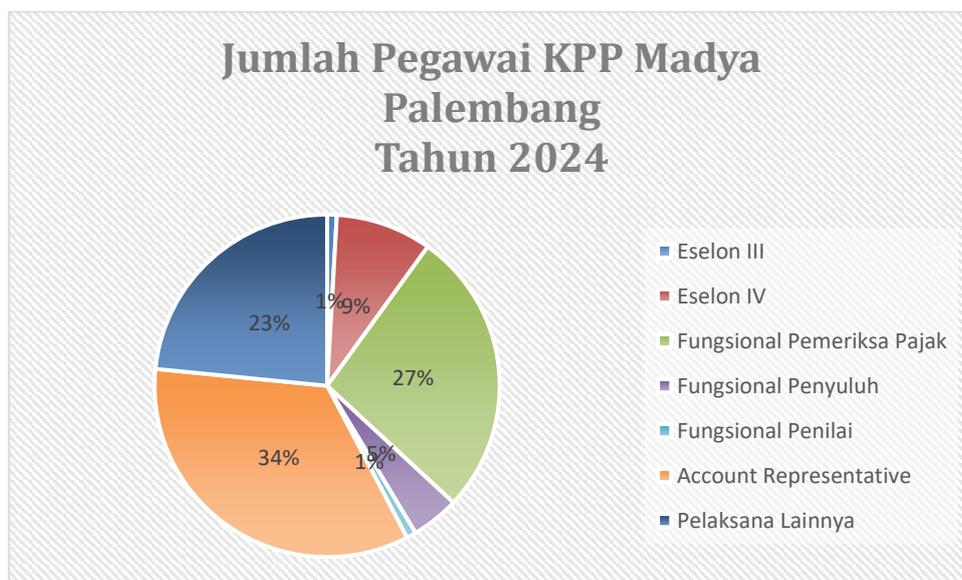
- c. Pencapaian keluaran adalah pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan.

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 120. Dengan demikian, IKU tersebut telah mencapai target Indeks PKPA.



C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun rincian dari jumlah Sumber Daya Aparatur KPP Madya Palembang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :



No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	10
3.	Fungsional Pemeriksa Pajak	30
4.	Fungsional Penyuluh	5
5.	Fungsional Penilai	1
6.	Account Representative	38
7.	Pelaksana Lainnya	26
Total		111

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya perbandingan Pagu SPD tahun 2023 dan 2024 :

PAGU SPD	2023	2024
	Rp 910.784.000	Rp 939.628.000

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggaran yang ada telah dialokasikan dengan baik untuk kebutuhan sarana dan prasarana KPP Madya Palembang terutama di bidang Pagu SPD tahun 2024 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini akan meningkatkan jumlah kunjungan (visit) ke Wajib Pajak demi mencapai penerimaan pajak.

D. Kinerja Lain-Lain.

Berikut beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja KPP Madya Palembang Tahun 2024 :

a) Tim CTA

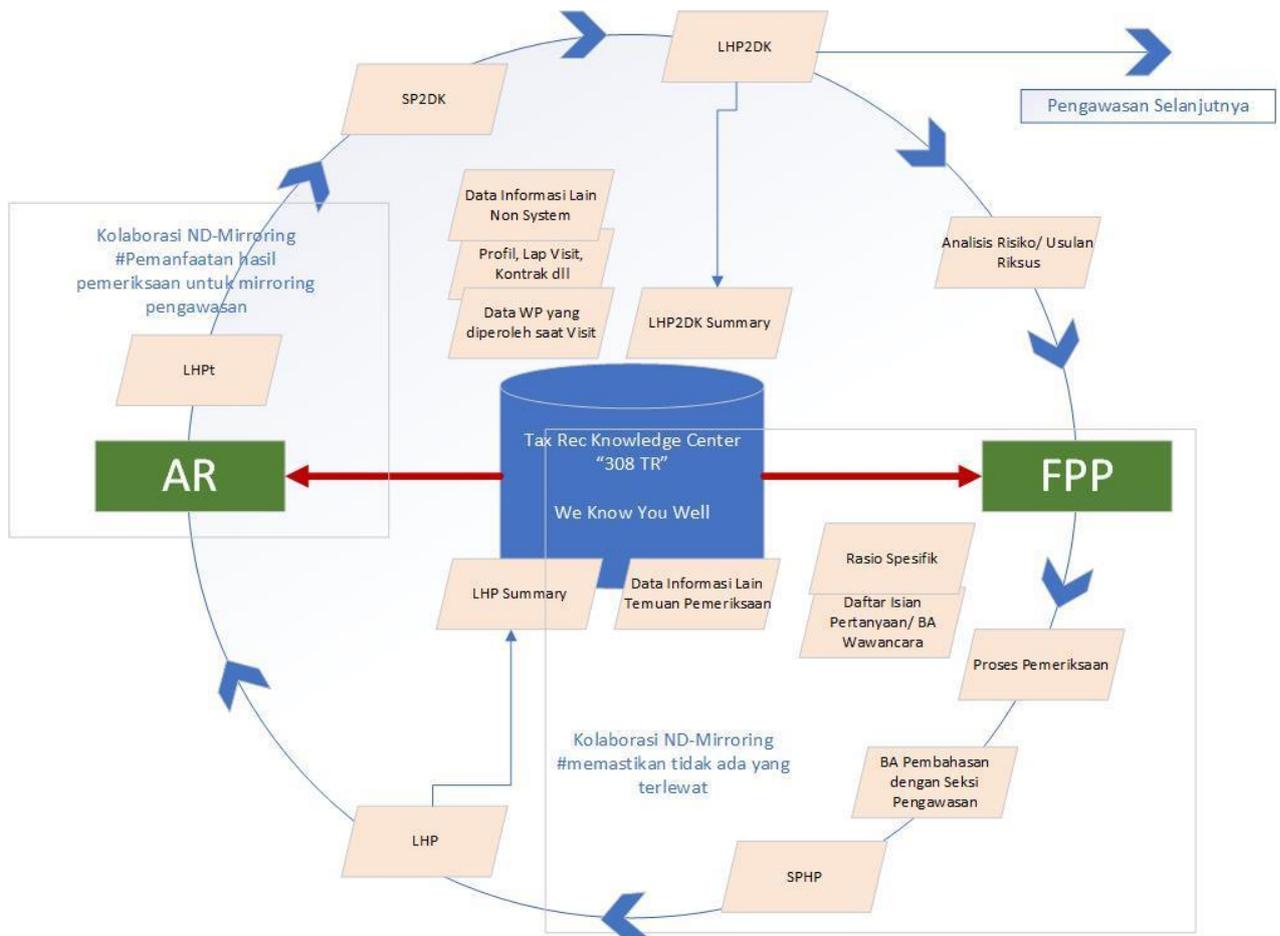
Gugus Tugas Data dan Pengamanan Penerimaan (Tim CTA) bertugas untuk melakukan pencarian dan pengumpulan data yang diperoleh dari pihak internal dan eksternal. Selanjutnya, data akan diolah kemudian akan didistribusikan kepada *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa untuk dilakukan pengawasan. Selain itu dilakukan pemaparan bedah profil wajib pajak secara berkala dan dilakukan Forum Diskusi dengan Kanwil setiap bulan.

b) Modul Sektor KPP Madya Palembang

Tujuan dibuatnya modul ini salah satunya adalah agar ada *benchmarking* di wilayah Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung.

c) *ND Mirroring*

ND Mirroring adalah inovasi yang dilakukan pada KPP Madya Palembang berupa perbaikan pada SOP pelaksanaan pengawasan wajib pajak oleh *Account Representative* dan pemeriksaan wajib pajak oleh *Fungsional Pemeriksa*. Inovasi dilakukan dengan melakukan sinergi dan koordinasi antara *Account Representative* dan *Fungsional Pemeriksa* pada proses pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak, sehingga akan terjadi pemahaman terhadap wajib pajak yang tinggi (*continuing tax assessment*) dengan harapan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak ke depannya.



d) *Linktree*

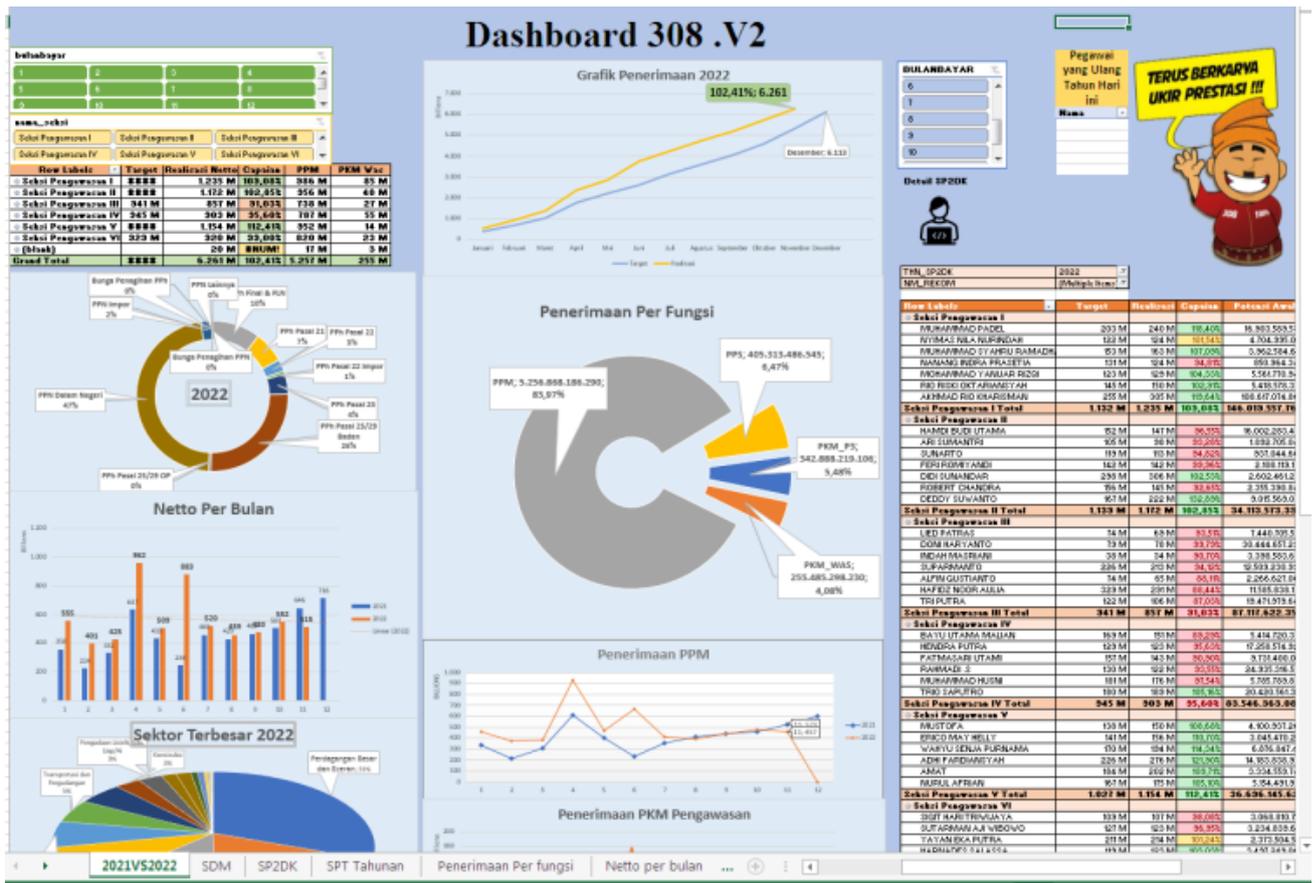
Layanan online berbasis *web* yang berisi beberapa tautan dari laman internal DJP sebagai sarana bagi *Wajib pajak* untuk mendapatkan informasi, dan layanan konsultasi secara *one on one*. Manfaat untuk *Wajib pajak* yaitu sebagai *Quick Access* untuk informasi dan layanan yang tercakup didalam laman internal DJP.

atau dengan memindai
QR Code berikut :



e) *Dashboard 308*

Dashboard 308 adalah inovasi yang dilakukan oleh KPP Madya Palembang berupa pembuatan *dashboard* yang berisi *monitoring* mingguan dari kumpulan data yang potensial di KPP Madya Palembang, sebagai sarana untuk melakukan pemutakhiran data. *Dashboard 308* menjadi bahan *monitoring* dan evaluasi penerimaan di lingkungan KPP Madya Palembang.



f) *Tim Coaching Mentoring Counselling*

CMC (Coaching Mentoring Counselling) bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja AR dan Jurusita melalui coaching, mentoring, dan counselling oleh Kepala Kantor ke Kepala Seksi lalu akhirnya ke AR dan Jurusita.

g) SIGAP 308

KEP-71/KPP.0308/2022 tentang Penetapan Visi, Misi, dan Motto Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang per 1 Agustus 2022 menetapkan SIGAP (Santun, Integritas, Gesit, Akurat, Profesional) sebagai motto pelayanan KPP Madya Palembang dalam memberikan layanan terbaik kepada para stakeholder.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini bepedoman pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Madya Palembang ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas rencana kinerja tahun 2024. Dari Laporan Kinerja ini dapat diperoleh informasi tentang hasil kinerja yang telah dilakukan melalui beberapa program dan rincian kegiatan.

Capaian kinerja KPP Madya Palembang tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan indeks capaian NKO sebesar 109,38% tetapi masih ada dua IKU yang tidak mencapai target, yaitu Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan realisasi sebesar 97,39% dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan realisasi sebesar 99,96%. Namun, NKO pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sinergi yang baik telah dilakukan oleh semua pegawai sesuai dengan uraian jabatan dan tugas masing-masing. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2025, KPP Madya Palembang berkomitmen dengan membuat rencana kerja yang terukur sesuai bidang tugas masing-masing, serta mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Komitmen untuk terus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dan Stakeholder juga terus ditingkatkan dalam rangka mencapai sasaran penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan dalam rangka mengemban visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KPP KPP MADYA PALEMBANG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,90
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,90
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,39	Max	P/L	19,00%	42,22%	97,39
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,33
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,42
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,96%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,96
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	122,07%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,23
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,23%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,23
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,88
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,60
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,19%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,19
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,92%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,78
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,36%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,36
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	114,68%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,47
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,94
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,21	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,21
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,95	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,53
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,38

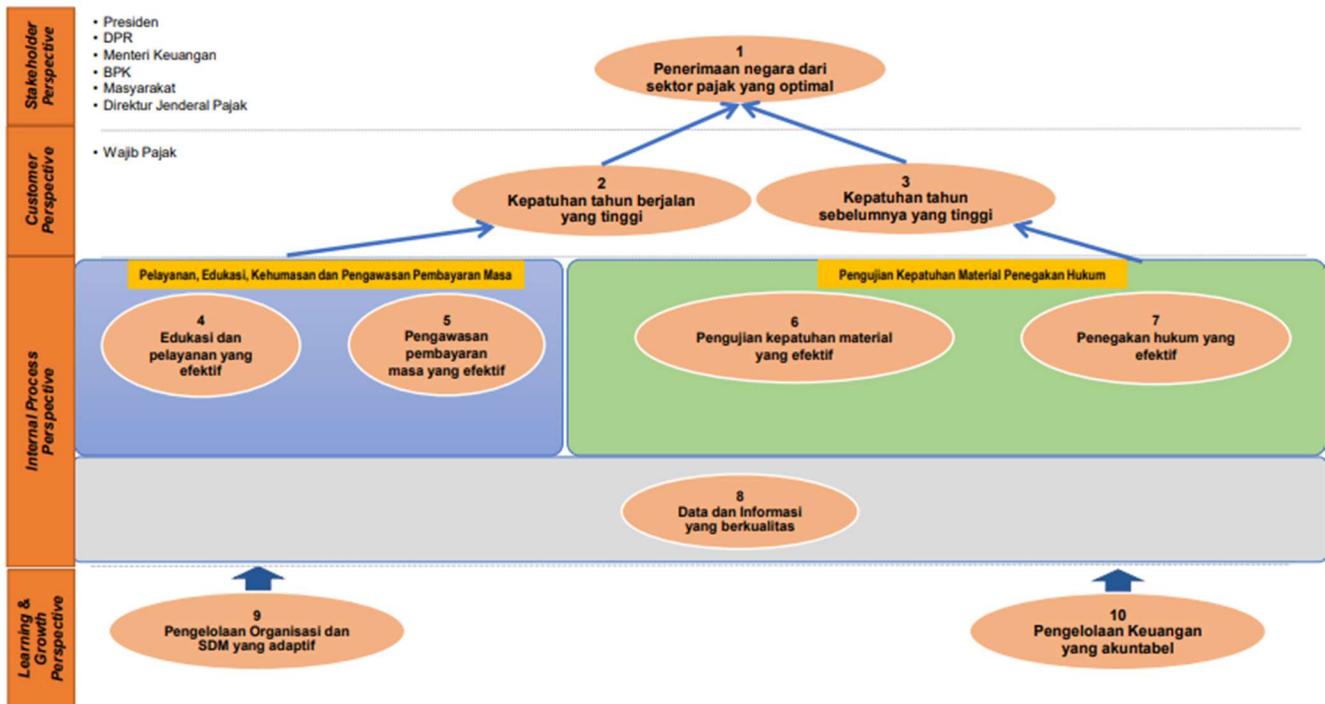
Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/WPJ.03/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.371.142.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 360.042.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.011.100.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 3.580.466.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 2.497.492.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.082.974.000
Total	Rp 4.951.608.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan
dan Kepulauan Bangka Belitung,

Palembang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Palembang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tarmizi



Ditandatangani Secara Elektronik
Ega Fitrinawati



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	53%	53%	79%	79%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	24%	53%	53%	79%	79%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Palembang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Palembang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ega Fitrinawati



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	UIC	Biaya
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Penerimaan pajak 100% dari target yang ditetapkan	Q1 sampai dengan Q4 1. Tindak Lanjut data perpajakan, pengawasan dan pembayaran masa Wajib Pajak Sektor Prioritas 2. Tindak Lanjut DPP Kolaboratif, pengawasan dan penelitian kepatuhan Wajib Pajak Sektor Prioritas	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Kepala Kantor, Kepala Seksi Pengawasan, dan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan penagihan	-
2.	Persentase Pengawasan Pembayaran	Melakukan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan, dinamisasi	Meningkatkan Kepatuhan	Q1 sampai dengan Q4 1. Melakukan pengawasan atas	1. Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Kepala Kantor,	-



	Masa WP Strategis	PPh Pasal 25 serta melaksanakan penelitian dan tindak lanjut data matching, atas data pada Daftar nominatif yang disediakan oleh kantor pusat DJP	Pembayaran Pajak	<p>pembayaran dan pelaporan atas SPT Masa untuk masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa Oktober tahun berjalan serta SPT Tahunan untuk satu tahun pajak sebelum tahun berjalan, berdasarkan Daftar nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat DJP melalui aplikasi</p> <p>2. Melakukan Dinamisasi angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan daftar nominatif sasaran Wajib Pajak yang ditetapkan Kanwil berdasarkan data oleh kantor pusat</p>			Kepala Seksi Pengawasan	
--	-------------------	---	------------------	---	--	--	-------------------------	--



				3. Melaksanakan penelitian dan tindak lanjut data matching, atas data yang ada pada sistem aplikasi untuk Masa Pajak dan Tahun pajak yang jatuh tempo di tahun berjalan yang telah ada di aplikasi pada periode 1 Januari sampai dengan 30 November				
3.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	Melakukan pemanggilan konseling sesegera mungkin setelah SP2DK terbit secara langsung	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q1 sampai dengan Q4 1. Melakukan analisis dan penelitian penggalan potensi atas data perpajakan yang ada 2. Membuat konsep dan mengirim surat permintaan penjelasan atas data dan/atau	1. Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Kepala Kantor, Kepala Seksi Pengawasan	-



				<p>keterangan ke wajib pajak</p> <p>3. Melakukan kunjungan kerja (visit) terkait proses SP2DK</p> <p>4. Melakukan tindak lanjut konfirmasi atas data dan/atau keterangan melalui SP2DK dengan konseling terhadap wajib pajak</p>				
4.	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Menyampaikan usulan pemeriksaan (DSPP dan DSP3) awal waktu di setiap tahap	Penyampaian usulan pemeriksaan (DSPP dan DSP3) awal waktu di setiap tahap	Q1 sampai dengan Q4 Menyampaikan usulan pemeriksaan (DSPP dan DSP3) kepada Kepala Kanwil di awal waktu untuk setiap tahap pengusulan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Kepala Kantor, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	-
5.	Tingkat efektivitas penagihan	Melakukan tindakan penagihan dengan semaksimal mungkin	Penyelesaian tindakan penagihan berupa ST, SP, Blokir, SPMP / Sita, Penjualan	Q1 sampai Q4 akan melakukan upaya optimal untuk mencapai target ST, SP, Blokir, SPMP / Sita, Penjualan barang sitaan, dan	1. Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Kepala Kantor, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	-



			barang sitaan, dan Pencegahan	Pencegahan yg diberikan				
6.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Masa Pembayaran (PPM)	Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 100%	Q1 sampai Q4 himbauan penyampaian SPT kepada Wajib Pajak melalui berbagai saluran	Q1 sampai dengan Q4 Himbau Penyampaian SPT	Januari - Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pengawasan	-

Palembang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Palembang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ega Fitrinawati



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ega Fitrinawati	NAMA	Tarmizi	
NIP	197010161995032001	NIP	196711111993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Jenderal Pajak
Sumatera Selatan Dan
Kepulauan Bangka Belitung)

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Palembang, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ega Fitrinawati
197010161995032001



Ditandatangani secara elektronik
Tarmizi
196711111993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	112 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	53%	53%	79%	79%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	24%	53%	53%	79%	79%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ega Fitrinawati
197010161995032001

Palembang, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Tarmizi
196711111993101001



TERIMA KASIH

“Terus Berkarya, Ukir Prestasi”